FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEANDALAN DAN *TIMELINESS* PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

(Studi pada BLU di Kota Semarang)

Faristina Rosalin

Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain empirical evidence about factors that affect the reliability and timeliness of financial reporting. This research is motivated by the fact that the government financial reporting should provide information on reliable and timely in assessing accountability and decision making of various parties.

Variables that will be tested in this study is the quality of human resources, utilization of information technology, accounting internal controls, and organizational commitment (as an independent variable) against the reliability of financial reporting (as the dependent variable) and the quality of human resources, utilization of information technology, accounting internal controls and organizational commitment (as an independent variable) on the timeliness of financial reporting (as the dependent variable). The data in this study is the primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data collected from 102 respondents who are BLU financial reporting staff in the city of Semarang. The hypothesis in this study were tested using multiple linear regression.

The results of this study is the first test showed that the utilization of technology, internal accounting controls, and organizational commitment significantly influence the reliability of financial reporting. While the quality of human resources did not significantly influence the reliability of financial reporting. In the second test showed that the utilization of information technology and organizational commitment significantly influence the timeliness of financial reporting. While the quality of human resources and accounting internal controls did not significantly influence the timeliness of financial reporting.

Keywords: Financial reporting, reliability of financial reporting, timeliness of financial reporting.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu:

   a. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*

      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

   b. Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*

      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

   c. Tepat waktu

      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

   d. Lengkap

      Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.

2. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi *(verifiability)*

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 yang secara khusus menggunakan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja pemerintah, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan dituntut keandalan dan *timeliness*. Dengan demikian, adanya kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di instansi pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan di instansi pemerintah.

Penelitian–penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan, antara lain dalam penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) memberikan temuan empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern akuntansi signifikan

mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Peneliti Aritonang dan Syarif (2009) menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia pada bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap *timeline*ss pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah secara spesifik meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ada kemungkinan faktor ini juga mempengaruhi penerapan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
2. Penelitian ini menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel independen untuk diuji kembali karena telah diteliti sebelumnya oleh Aritonang dan Syarif (2009).
3. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah menguji pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini akan menambahkan pengujian pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan..

Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang karena Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang sedang meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan berupaya mewujudkan *good governan*ce dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam PMK No. 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir; b) laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan c) laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Selanjutnya dalam PP No 24 Tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa salah satu informasi keuangan yang relevan adalah tepat waktu. Karena adanya tuntutan dari regulasi agar Badan Layanan Umum membuat laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat diandalkan sehingga faktor- faktor dari keandalan dan *timeliness* penting untuk diteliti. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang dalam pelaksanaan keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan. Penelitian ini diberi judul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum ".**

TELAAH TEORI

Agency Theory (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling dalam Septiani, 2005).

Menurut Hendriksen dan Breda (1992, h.207) dalam Septiani (2005), prinsipal diasumsikan mempunyai tanggungjawab untuk memilih sistem informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Para pemilik disebut sebagai evaluator informasi dalam konteks ini; agen-agen mereka disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi diasumsikan bertanggung jawab untuk memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. Dengan kata lain bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh agen sehingga fungsi utilitas untuk kepentingan akhir adalah milik prinsipal. Permasalahan tersebut diperumit dengan adanya kebutuhan untuk memperhitungkan fungsi utilitas agen karena fungsi inilah yang menggerakan aksi-aksi agen.

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin, 2007).

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*)

mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain *(agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt dalam Pramitha, 2010). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (dalam Septiani, 2005), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai

keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005).

Beberapa penelitian lainnya mengenai kepatuhan pajak yang meneliti masalah-masalah sangsi terhadap batasan respons dilakukan oleh Christiansen dan Friedland (dalam Septiani, 2005) menemukan adanya bukti mengenai kesamaan efektifitas hukuman yang ringan dan yang berat. Meskipun demikian, masalah mengenai dampak sangsi yang tepat terhadap kepatuhan rnasih merupakan hal yang kontroversial, walaupun banyak penelitian mengindikasikan sangsi memiliki peran yang penting dalam mempertahankan kepatuhan.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik

Salah satu cara yang digunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan dalam satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, dalam Septiani 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di dalam SAK (2009) juga menjelaskan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan dan pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaganya, serta masyarakat yang menggunakan untuk kebutuhan informasi yang berbeda.

Penjelasan tentang Badan Layanan Umum

Pengertian Badan Layanan Umum sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

> Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menurut PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.

Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:

a. Sistem akuntansi keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah

stakeholders, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

b. Sistem akuntansi aset tetap

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset.

c. Sistem akuntansi biaya

Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Menurut PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
c. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi gambar hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sebagai variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi. Variabel independen ini akan diprediksi pengaruhnya terhadap variabel dependen keandalan pelaporan keuangan dan *timelines* pelaporan keuangan.

Model 1

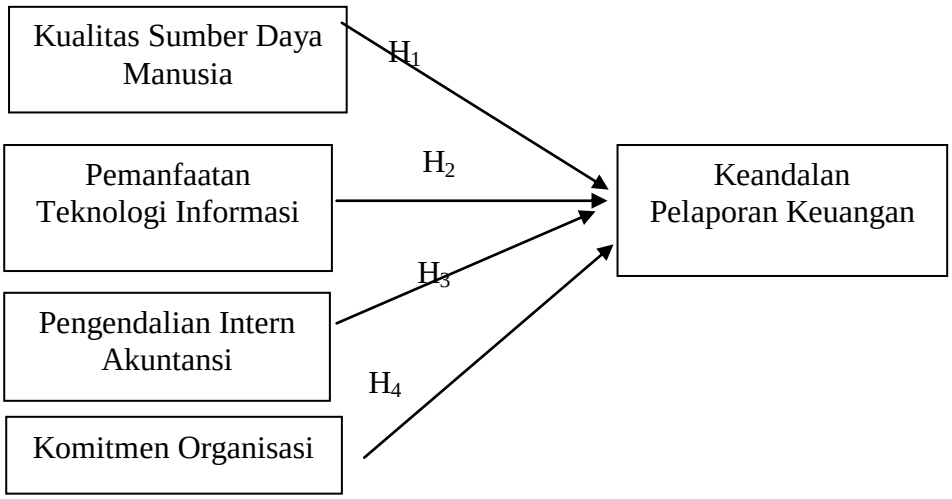

Model 2

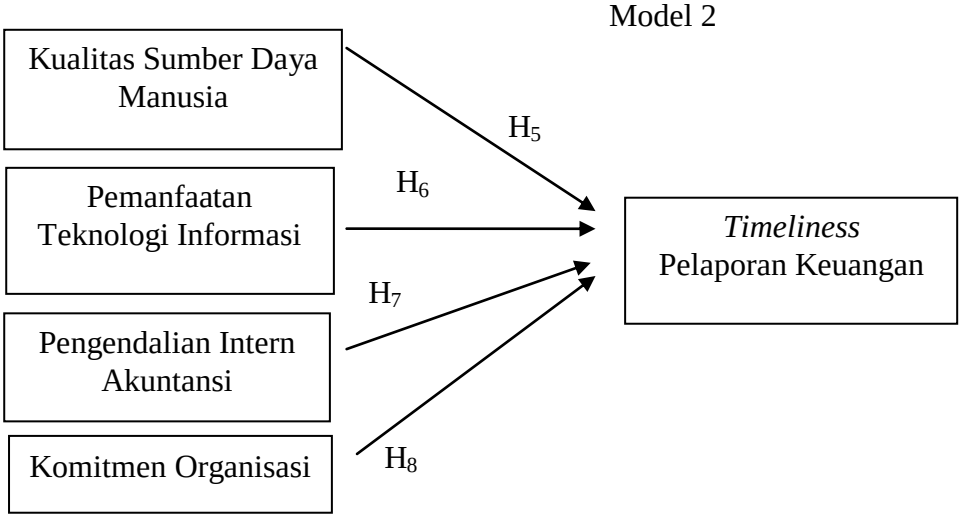

Hipotesis

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipótesis :

H_1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna. Pemanfaatan teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H_2 **:** Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam penelitiannya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survei terhadap kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan nilai informasi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipótesis :

H_3 : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005). Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H_4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu *timeliness*.

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hasil ini menjadi dasar hipotesis :

H_5 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Berdasarkan *Agency theory*, agen membuat keputusan terbaik bagi prinsipal berdasarkan informasi yang tersedia bagi agen, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi untuk mempengaruhi keputusan yaitu *timeliness*. Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data telah memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini menjadi dasar hipotesis :

H_6 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa system pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06 mengartikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian semakin tinggi pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi dasar hipotesis :

H_7 : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Luthans (2006) dalam Aritonang dan Syarif (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi paling sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Sehingga semakin seorang staf pelaporan keuangan

memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Aritonang dan Syarif (2009) menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat karakteristik agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Dalam hal ini salah satu informasi yang relevan adalah tepat waktu . Hasil ini menjadi dasar hipotesis :

H_8 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel dependen menjelaskan varibilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel dependen merupakan veriabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel dependen adalah keandalan pelaporan keuangan dan *timeliness* pelaporan keuangan.

a. Keandalan Pelaporan Keuangan (ANDAL PK)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2009 par 31 dikemukakan bahwa :

> Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*).

Variabel ini diukur dengan menggunakan 8 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) dan pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian karena pada dasarnya penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah spesifik meneliti pada Pemerintah Daerah dan penelitian ini meneliti pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Pertanyaan- pertanyaan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kondisi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan

Umum sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan penyajian setiap fakta informasi dalam laporan keuangan secara jujur, penyajian informasi dalam laporan keuangan yang dapat diverifikasi, serta penyajian informasi dalam laporan keuangan yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu berkaitan dengan penyajian Neraca, penyajian Laporan Realisasi Anggaran, penyajian Laporan Arus Kas, penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, serta adanya rekonsiliasi secara periodik antara catatan akuntansi dengan rekening koran bank. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 8-40.

b. *Timeliness* Pelaporan Keuangan (TM PK)

Timeliness menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. *Timeliness* juga menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Amey, Gordon, dan Narayanan) dalam (Septiani, 2005).

Dalam penyajian laporan keuangan (SAK, 2009), manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam menyatakan bahwa Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 4 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) dan pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian karena pada dasarnya penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah spesifik meneliti pada Pemerintah Daerah dan penelitian ini meneliti pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Pertanyaan- pertanyaan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kondisi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan- pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu penyampaian Laporan Triwulan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir, penyampaian Laporan Semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir serta penyampaian Laporan Tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 4-20.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)

Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan sumber daya manusia yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar (Susilo, 2002) dalam (Aritonang dan Syarif, 2009).

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Variabel ini diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) dan pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian karena pada dasarnya penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah spesifik meneliti pada Pemerintah Daerah dan penelitian ini meneliti pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Pertanyaan- pertanyaan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kondisi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pada kuesioner ini yaitu berkaitan dengan latar belakang pendidikan akuntansi, pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dibidang akuntansi, Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan proses akuntansi,

pelaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan, keterampilan penunjang dalam melaksanakan tugas (seperti: penguasaan bahasa inggris), serta keterlibatan diskusi berkaitan dengan pelaporan keuangan di tempat kerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 6-30.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*, 2000) dalam (Indriasari dan Nahartoyo, 2008). Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) dan pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian karena pada dasarnya penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah spesifik meneliti pada Pemerintah Daerah dan penelitian ini meneliti pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Pertanyaan- pertanyaan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kondisi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pada kuesioner ini yaitu berkaitan dengan tersedianya komputer dalam jumlah cukup untuk melaksanakan tugas, terpasangnya jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, pelaksanaan dalam pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta keterampilan mengoperasikan komputer dalam melaksanakan proses akuntansi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 5-25.

c. Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06 mengartikan pengendalian intern sebagai berikut:

> Pengendalian Intern adalah suatu proses- yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mahmudi (2007) dalam (Indriasari dan Nahartyo, 2008) menyebutkan bahwa komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur akuntansi.

   Sistem dan prosedur akuntansi keuangan merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi tertentu.

2. Otorisasi.

   Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan pemerintah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Jika tidak ada otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau jika ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

3. Formulir, dokumen, dan catatan.

   Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

4. Pemisahan tugas.

   Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja dan harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Pemisahan tugas secara tegas harus dipisahkan dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) dan pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian karena pada dasarnya penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah spesifik meneliti pada Pemerintah Daerah dan penelitian ini meneliti pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kondisi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan- pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, sistem akuntansi biaya, serta laporan keuangan telah direviu oleh satuan pemeriksaan intern atau aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 7-35.

d. Komitmen Organisasi (KO)

Mowday, Porter, dan Steers (1982) dalam Ikhsan dan Ishak (2008, h.35) mengemukakan bahwa:

> Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain :
>
> 1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
> 2. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
> 3. Loyalitas (*loyality*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhsan dan Ishak, 2008). Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan

keinginan dirinya dalam organisasi dan bersedia untuk melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian organisasi (Newstroom, 1989 dalam Augustia, 2010).

Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 item pertanyaan yang mengacu pada Newstroom (1989) dalam Augustia (2010). Pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 7-35.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah staf pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah staf pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang tersebar di Kota Semarang. Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan kemudahan akses yang dimiliki peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu, Kota Semarang mempunyai Satuan Kerja Badan Layanan Umum pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden staf pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum di Kota Semarang yang terdiri dari IAIN Walisongo Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Politeknik Ilmu Pelayaran, RSUP Dr. Kariadi, dan Politeknik Kesehatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan survei dengan mendatangi staf pelaporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang tersebar di Kota Semarang dan meminta bantuan kepada sampel untuk mengisi kuesioner yang tersedia. Adapun jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 125 kuesioner dimana jumlah kuesioner pada masing-masing BLU tidak sama (jumlah tergantung dari ketersediaan dari masing-masing BLU untuk mengisi kuesioner penelitian). Alasan peneliti mengirimkan 125 kuesioner karena sebelum menyerahkan kuesioner, peneliti menanyakan terlebih dahulu kepada penerima kuesioner dari masing-masing BLU tentang jumlah staf pelaporan keuangan dari masing-masing BLU tersebut

sehingga dapat disimpulkan jumlah kuesioner yang dapat dikirim pada BLU di Kota Semarang pada tanggal 21 April 2011 sebanyak 125 kuesioner. Kuesioner akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menanyakan identitas responden. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang variabel-variabel penelitian. Jenis pertanyaan kuesioner pada bagian kedua merupakan pertanyaan dengan skala tanggapan yang berpedoman pada skala likert. Cara pengisian kuesioner adalah dengan memilih salah satu antara angka 1 sampai dengan 5 dengan memberi tanda silang (X) yang berhubungan dengan item-item pertanyaan yang telah disediakan, sesuai dengan kondisi dalam unit kerja. Untuk menghindari keraguan responden terhadap berbagai pertanyaan yang mungkin dianggap sensitif, maka dalam surat permohonan juga diterangkan bahwa informasi dalam responden akan dijaga kerahasiaannya.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata *(mean)*, standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2006).

Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2006), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. skor (Ghozali, 2006).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas , dan Uji Normalitas.

Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2006), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling

berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bias ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel-variabel independen < 10, berarti tidak ada Multikolinearitas.

Uji Heteroskedasitisitas

Uji heteroskedasitisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasitisitas (Ghozali, 2006).

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak menurut Ghozali (2006) yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plot*. Disamping uji grafik dianjurkan dilengkapi dengan uji statistik salah satunya dengan uji statistik *non parametric Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$Y_1 = \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \varepsilon$

$Y_2 = \beta_5.X_1 + \beta_6.X_2 + \beta_7.X3 + \beta_8.X_4 + \varepsilon$

Keterangan :

Y_1 = Keandalan pelaporan keuangan

Y_2 = *Timeliness* pelaporan keuangan

X_1 = Kualitas sumber daya manusia

X_2 = Pemanfaatan teknologi informasi

X_3 = Pengendalian intern akuntansi

X_4 = Komitmen organisasi

ε = *error*

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Goodness of Fit Model*. Uji *Goodness of Fit Model* digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (α=5%).

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (α=5%).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini adalah Badan Layanan Umum di Kota Semarang secara khusus staf pelaporan keuangan di instansi pemerintah yang terdiri dari IAIN Walisongo Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Politeknik Ilmu Pelayaran, RSUP Dr. Kariadi, dan Politeknik Kesehatan. Pemilihan responden ini didasarkan pada kriteria memiliki tanggungjawab terhadap pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Penelitian dilakukan dengan mengirimkan 125 kuesioner secara langsung pada tanggal 21 April 2011. Kuesioner yang kembali sebanyak 102 kuesioner sedangkan kuesioner yang layak dianalisis adalah 102 kuesioner. Adapun tingkat *respon rate* dari penelitian ini adalah 81,6%.

Demografi Responden Penelitian

Berdasarkan dapat dilihat bahwa komposisi *basic* keilmuan dibagi dalam tujuh kelompok yaitu *basic* keilmuan akuntansi sebesar 67 orang atau 65,69%, *basic* keilmuan manajemen sebesar 8 orang atau 7,84%, *basic* keilmuan hukum sebesar 3 orang atau 2,98%, *basic* keilmuan teknik sebesar 4 orang atau 3,92%, *basic* keilmuan MIPA sebanyak 2 orang atau 1,96%, *basic* keilmuan

FISIP sebanyak 1 orang atau 0,98%, dan *basic* keilmuan selain dari yang disebutkan sebanyak 17 orang atau 16,67%.

Analisis Data

Data hasil tabulasi yang diolah dengan menggunakan program SPSS menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian seperti yang tampak pada tabel.

Variabel	Kisaran Teoritis	Rata-Rata Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-Rata Sesungguhnya	Standar Deviasi
Keandalan Pelaporan Keuangan	8 s/d 40	32	26 s/d 40	33.44	3.189
Timeliness Pelaporan Keuangan	4 s/d 20	16	8 s/d 20	15.64	2.114
Kualitas Sumber Daya Manusia	6 s/d 30	24	15 s/d 29	24.01	2.661
Pemanfaatan Teknologi Informasi	5 s/d 25	20	14 s/d 25	20.40	2.389
Pengendalian Intern Akuntansi	7 s/d 35	28	20 s/d 35	28.43	2.823
Komitmen Organisasi	7 s/d 35	27	18 s/d 35	26.98	3.273

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Keandalan Pelaporan Keuangan: f(X1,X2,X3,X4)

Keterangan	**Nilai**	**Standardized Coefficients**	**t**	**Sig. T**
Adj R^2	0,482			
F hitung	24,464			
Sig. F hitung	0,000			
Kualitas Sumber Daya Manusia		0,053	0,657	0,513
Pemanfaatan Teknologi Informasi		0,295	3,431	0,001
Pengendalian Intern Akuntansi		0,377	4,642	0,000
Komitmen Organisasi		0,198	2,217	0,029

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

***Timeliness* Pelaporan Keuangan: f(X1,X2,X3,X4)**

Keterangan	Nilai	Standardized Coefficients	t	Sig. T
Adj R^2	0,417			
F hitung	19.061			
Sig. F hitung	0,000			
Kualitas Sumber Daya Manusia		0,068	0,790	0,432
Pemanfaatan Teknologi Informasi		0,487	5,342	0,000
Pengendalian Intern akuntansi		0,058	0,671	0,504
Komitmen Organisasi		0,191	2,015	0,047

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

Y1= 0,053 X1 + 0,295 X2+ 0,377 X3 + 0,198 X4

Y2 = 0,068 X1 + 0,487 X2+ 0,058 X3+ 0,191 X4

Pembahasan

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel kualitas sumber daya manusia positif sebesar 0,053 dengan nilai signifikansi 0,513 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi kualitas sumber daya manusia lebih besar dari 0,05 atau 5% maka berhasil menerima H_0. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal tersebut mungkin dikarenakan tidak semua staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum di Kota Semarang memiliki *basic* keilmuan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya seorang staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum harus ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum demi

meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Semakin besar pendidikan, pengalaman dan keahlian seorang staf maka staf tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi positif sebesar 0,295 dengan nilai signifikansi 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Karena nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka berhasil menolak H_0. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Layanan Umum dapat memberikan peningkatan keandalan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel pengendalian intern akuntansi positif sebesar 0,377 dengan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Karena nilai signifikansi pengendalian intern akuntansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka berhasil menolak H_0. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya pengendalian intern akuntansi pada Badan Layanan Umum dapat memberikan peningkatan keandalan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel komitmen organisasi positif sebesar 0,198 dengan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Karena nilai signifikansi komitmen organisasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka berhasil menolak H_0. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aritonang dan Syarif (2008) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat karakteristik agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya komitmen organisasi pada Badan Layanan Umum dapat memberikan peningkatan keandalan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kelima (H_5)

Hipotesis kelima yang diajukan menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel kualitas sumber daya manusia positif sebesar 0,068 dengan nilai signifikansi 0,432 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi kualitas sumber daya manusia lebih besar dari 0,05 atau 5% maka H_0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan. Hal tersebut mungkin dikarenakan tidak semua staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum di Kota Semarang memiliki *basic* keilmuan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya seorang staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum harus ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum demi meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan. Semakin besar pendidikan, pengalaman dan keahlian seorang staf maka staf tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Keenam (H_6)

Hipotesis keenam yang diajukan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi positif sebesar 0,487 dengan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Karena nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka berhasil menolak H_0. Dengan demikian variabel hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Indriasari dan Nahartyo (2008) , Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Layanan Umum dapat memberikan peningkatan *timeliness* pelaporan keuangan yang harus dipenuhi.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketujuh (H_7)

Hipotesis ketujuh yang diajukan menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel pengendalian intern akuntansi positif sebesar 0,058 dengan nilai signifikansi 0,671 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka H_0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian variabel hasil pengujian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel pengendalian intern akuntansi terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern akuntansi perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Jusup (2001) terdapat lima komponen pengendalian intern yaitu terdiri dari lingkungan pengendalian, perhitungan risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan monitoring. Dalam hal ini Badan Layanan Umum perlu meningkatkan informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan pengendalian intern yang harus dipenuhi. Menurut Jusup (2001) sistem informasi yang menyangkut dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggungjawab masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas laporan keuangan. Komunikasi berarti meyakinkan bahwa personil yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan mengerti bagaimana kegiatan yang dilakukannya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan orang lain, baik dari orang dari dalam maupun dari luar organisasi.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedelapan (H_8)

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel komitmen organisasi positif sebesar 0,191 dengan nilai signifikansi 0,047 (lebih kecil dari 0,05). Karena nilai signifikansi komitmen organisasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka berhasil menolak H_0. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aritonang dan Syarif (2009) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat

karakteristik agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Dalam hal ini salah satu informasi yang relevan adalah tepat waktu. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya komitmen organisasi yang dimiliki Badan Layanan Umum maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum yang harus dipenuhi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Badan Layanan Umum perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan yaitu dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Pemanfaatan teknologi informasi secara positif berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki Badan Layanan Umum dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum yang harus dipenuhi.
3. Pengendalian intern akuntansi secara positif berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi yang dimiliki Badan Layanan Umum dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum yang harus dipenuhi.
4. Komitmen organisasi secara positif berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki Badan Layanan Umum dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum yang harus dipenuhi.
5. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Badan Layanan Umum perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan yaitu dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
6. Pemanfaatan teknologi informasi secara positif berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki Badan Layanan Umum dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum yang harus dipenuhi.

7. Pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi yang dimiliki Badan Layanan Umum perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan.

8. Komitmen organisasi secara positif berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki Badan Layanan Umum dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum yang harus dipenuhi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, diantaranya:

1. Adanya variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan namun belum tercakup dalam penelitian ini.
2. Penyebaran kuesioner pada politeknik kesehatan, politeknik ilmu pelayaran dan RSUP Dr. Kariadi tidak dapat dilakukan kesemua staf pelaporan Badan Layanan Umum. Hal ini disebabkan kesibukan staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum dan keterbatasan waktu.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan seperti perangkat pendukung. Penelitian ini juga dapat menambahkan variabel depanden yang lain seperti dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Wilayah penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Badan Layanan Umum pada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian di Satuan Kerja Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga lain yang telah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Aldiani Sultani dan Firman Syarif. 2009. ″Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.″ Jurnal Akuntansi, Vol. 12.

Augustia, Sekarani Yuteva . 2010. *Analisis pengaruh etika kerja islam terhadap komitmen profesi internal auditor, komitmen organisasi, dan sikap perubahan organisasi (Studi Empiris Terhadap Internal Auditor Perbankan Syariah di Kota Semarang dan Jakarta)*. Skripsi S1 Program Reguler I Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikhsan, Arfan dan M. Ishak. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo . 2008. ″Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir),″ dalam *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli. Pontianak.

Jusup, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan*). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Pramitha, Josephine Betsy. 2010. ″Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak).″ Skripsi S1 Program Reguler I Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Septiani, Aditya. 2005. ″Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pasar Modal yang sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan″. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Suryabrata, S. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. ″Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN),″ dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. 13-14 Oktober. Purwokerto.